
KEPEMIMPINAN PELAKSANA TUGAS (PLT) *KEUCHIK*
PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN
GAMPONG

(Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)

Muhajir, Radhi Darmansyah
(ajirm176@gmail.com, e.rxdhi@gmail.com)

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Kepemimpinan pelaksana tugas *Keuchik* (Kepala Desa) merupakan pengangkatan langsung yang dilakukan oleh Bupati Aceh Besar untuk menggantikan 28 dari 32 *keuchik* yang diberhentikan di Kecamatan Darul Imarah. Diantara 28 pelaksana tugas tersebut terdapat 10 orang perempuan yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin ditingkat *Gampong* (Desa). Pemerintahan *Gampong* yang dipimpin oleh kalangan perempuan menjadi hal yang sangat jarang ditemui di Kabupaten Aceh Besar, mengingat bahwa Aceh yang masih sangat kental dengan budaya patriarki sehingga menyebabkan kurangnya peluang bagi kaum perempuan untuk dijadikan sosok pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan pelaksana tugas *keuchik* perempuan dalam pengelolaan pemerintahan *gampong* di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui kendala pelaksana tugas *keuchik* perempuan dalam pengelolaan pemerintahan *gampong* di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan pelaksana tugas *keuchik* Perempuan kurang mendapatkan respon positif dari mayoritas masyarakat *gampong*. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya karakteristik kepemimpinan yang dibawa oleh pelaksana tugas *keuchik* Perempuan dan terkendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat *gampong*. Kesimpulan dari

penelitian ini adalah kepemimpinan pelaksana tugas *keuchik* perempuan dalam peneglolaan pemerintahan *gampong* masih terdapat pertentangan yang diakibatkan oleh pandangan skeptis masyarakat *gampong* terhadap kapabilitas kepemimpinan perempuan dan terkendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan keterbatas dalam membagi waktu antara kewajibannya sebagai PNS Kantor Camat, plt *keuchik gampong* dan tanggung jawabnya sebagai Ibu rumah tangga. sehingga sedikit banyak menghambat perempuan dalam mewujudkan kepemimpinan yang ideal seperti yang diharapkan oleh pengikutnya.

Kata Kunci : Kepemimpinan Perempuan, Strategi Kepemimpinan, Pemerintah Aceh Besar

ABSTRACT

The leadership of executing the task Keuchik (Village Head) is an appointment made directly by the Regent of Aceh Besar to replace 28 of 32 keuchik who were dismissed in the District of Darul Imarah. Among the 28 implementing the task, there are 10 women who are appointed to be leaders at the Gampong (Village). The government Gampong are headed by members of the female being very rarely found in the District of Aceh Besar, given that Aceh is still very thick with the culture of patriarchy that lead to a lack of opportunities for women to be a leader. This study aims to determine the leadership of executing the task of women as a head of the village in the management of the government of the village in The district of Darul Imarah and to know the constraints of implementing the task keuchik of women in managing government of the village in the district of Darul Imarah. The methods used in this study using a qualitative approach to the types of descriptive research. The technique used is the informant selection technique of purposive sampling. Data collection tools used in the form of semi-structured interview and documentation study. The results of the study show the leadership of women as the head of the village get less positive response from the majority of the gampong. It is influenced by the lack of leadership characteristics brought by the Women and is constrained in providing services to the community of gampong. Conclusion of this research is the leadership of the incumbent Government in the management of women as head of village still contained a contradiction caused by the skeptical view of society towards leadership capabilities of a women and constrained in providing service to the community due to the limitation in splitting times between his duties as a CIVIL SERVANT,

**Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik Perempuan dalam 2
Pengelolaan Pemerintahan Gampong (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

head of the villages and his responsibilities as a housewife. so it's a bit much hindered women in realizing the ideal leadership as expected by his followers.

Keywords : *Woman Leadership, Leadership Strategies, Aceh Besar Government*

PENDAHULUAN

Pemerintah *gampong* merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat *gampong*. Pemerintah *gampong* diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala *gampong* (*keuchik*) beserta para pembantunya (Perangkat *gampong*), mewakili masyarakat *gampong* membangun hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah *gampong* mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat di *gampong*, membina perekonomian *gampong*, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat *gampong*, mendamaikan perselisihan masyarakat di *gampong*, mengajukan rancangan Qanun *gampong* dan menetapkannya sebagai Qanun *gampong* bersama dengan *Tuha Peuet*.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat tempat yang diakui dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Jauh sebelum disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pemerintah Aceh sudah terlebih dahulu memiliki produk hukum yang mengatur tentang Pemerintahan Desa yang tertuang didalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Desa/*Gampong*. Berdasarkan Qanun tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Desa/*Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung berada dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *keuchik* dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Di Kabupaten Aceh Besar sendiri, produk hukum yang

**Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) *Keuchik* Perempuan dalam 3
Pengelolaan Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

mengatur tentang pemerintahan *gampong* tertuang dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pemerintahan *Gampong* adalah *Keuchik gampong* dan *Tuha Peut gampong* yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan *gampong*.

Pada tanggal 1 September 2016, Forum *Keuchik* Kecamatan Darul Imarah melakukan silaturahmi dengan DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka meminta agar Kecamatan Darul Imarah masuk dalam wilayah administratif Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan *keuchik* yang tergabung dalam forum *keuchik* Darul Imarah yang diakibatkan oleh ketimpangan pembangunan yang terjadi didalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Besar. Menurut forum *keuchik* Kecamatan Darul Imarah tindakan yang dilakukannya adalah semata-mata memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Darul Imarah yang telah lama mengidamkan pelayanan publik yang memuaskan. Akan tetapi, tindakan ini mendapat tanggapan yang berbeda dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang menganggap tindakan yang dilakukan oleh forum *keuchik* Darul Imarah telah melanggar peraturan daerah, bahkan menyamakan tindakan tersebut sebagai perbuatan kudeta terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Untuk menanggapi permasalahan yang terjadi antara Forum *Keuchik* Darul Imarah dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, maka pada tanggal 17 September 2016, Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah S.Sos mengundang para *keuchik* Kecamatan Darul Imarah untuk menghadiri rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Dalam rakor tersebut, hanya 4 dari 32 *keuchik* di Kecamatan Darul Imarah yang hadir memenuhi undangan rakor dari Bupati Aceh Besar, sedangkan 28 lainnya menolak hadir dalam rangka mengikuti rakor dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (<http://acehraya.co.id>)

Dikarenakan pembangkangan yang dilakukan oleh 28 dari 32 *keuchik* yang tergabung dalam Forum *Keuchik* Darul Imarah, maka pada tanggal 19 September 2016 Bupati Aceh Besar memerintahkan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Aceh Besar untuk mencabut SK (Surat Keputusan) pengangkatan 28 *keuchik* di Kecamatan tersebut dan selanjutnya digantikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kantor Camat Darul Imarah yang menjadi Pelaksana tugas (Plt) *Keuchik*. Pelaksana tugas (Plt) yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) kantor Camat Darul

**Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) *Keuchik* Perempuan dalam 4
Pengelolaan Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

Imarah terdiri dari 18 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Untuk penempatan Plt *Keuchik* perempuan di 10 *Gampong* ialah Lampeuneurut *Gampong*, Lheu Blang, Punie, Kandang, Pasheu Butong, Lamsidaya, Lheu Ue, Payaroh, Ulee Tuy dan *Gampong* Lamkawe.

Pada umumnya, kepemimpinan perempuan pada skala desa sangat jarang dijumpai di Aceh. Khusus di Kabupaten Aceh Besar, fenomena ini sebelumnya belum pernah terjadi. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kalangan perempuan menjadi hal yang sangat jarang di Kabupaten Aceh Besar, mengingat bahwa Aceh yang masih sangat kental dengan budaya patriarki sehingga menyebabkan kurangnya peluang bagi kaum perempuan untuk dijadikan sosok pemimpin. Namun keterlibatan dan keberhasilan perempuan untuk menjadi pemimpin desa, bisa terjadi karena antara lain didukung oleh adanya peluang yang diberikan oleh peraturan daerah, luntarnya budaya patriarki masyarakat, dan adanya penilaian positif dari masyarakat terhadap kaum perempuan.

Adapun masalah yang dihadapi oleh pemimpin perempuan adalah kurangnya kepercayaan kepada kapabilitas kepemimpinan perempuan. Selain itu, kurangnya waktu dalam melayani masyarakat dan bertatap muka langsung dengan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak dapat disosialisasikan secara langsung sehingga menghambat realisasi kebijakan *gampong* serta tingginya budaya patriarki di kalangan masyarakat Aceh menjadi penghambat bagi kepemimpinan plt *keuchiek* perempuan

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan teoritis landasan teori, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.

1. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan (*leadership*) berkenaan dengan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok untuk suatu tujuan. Hersey, Blanchard dan Natemeyer (Thoha, 2010:91) menyatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri

**Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) *Keuchik* Perempuan dalam 5
Pengelolaan Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

untuk memengaruhi orang lain, tetapi juga harus mengerti posisi mereka dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi orang lain sehingga menghasilkan kepemimpinan yang efektif.

Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal: pertama, adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi atau organisasi; kedua, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan. Dalam berbagai literatur, kepemimpinan dapat dikaji dari tiga sudut pandang, yakni:

1. Pendekatan sifat, atau karakteristik bawaan lahir, atau *traits approach*
Pendekatan sifat berusaha memahami kepemimpinan berdasarkan keyakinan bahwa pemimpin yang baik memiliki "karakteristik bawaan" dari lahir, baik menyangkut ciri fisik maupun kepribadian
2. Pendekatan gaya atau tindakan dalam memimpin, atau *style approach*
Teori tentang gaya kepemimpinan berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam mempengaruhi dan/atau menggerakkan para pengikutnya guna mencapai suatu tujuan.
3. Pendekatan kontingensi atau *contingency approach*.
Gaya kepemimpinan yang efektif atau optimal merupakan hasil penerapan strategi mempengaruhi pegawai dengan mempertimbangkan dan mengkombinasikan karakteristik pemimpin, pegawai (pengikut), dan konteks situasi.

Pada perkembangan selanjutnya, fokus kajian lebih banyak pada cara-cara menjadi pemimpin yang efektif, termasuk dengan mengembangkan kesadaran tentang kapasitas spiritual untuk menjadi pemimpin profesional dan bermoral (Wibowo : 2011).

2. Teori Good Governance

Good governance berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu "*good*" yang berarti baik, dan "*governance*" yang berarti tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut *good governance* dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *good governance* sering di artikan sebagai "pemerintahan yang

**Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik Perempuan dalam 6
Pengelolaan Pemerintahan Gampong (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

baik", adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik", disamping itu ada yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik".

Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tatakelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. (Mufazzal, 2017:16)

Gunawan Sumodiningrat (Alwi Hasyim, 2006: 1) mendefinisikan *good governace* sebagai upaya untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang amanah di sini adalah sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab, jujur, efisien serta efektif dalam penyelenggaraannya. Di sisi lain Mardiasmo (1998: 18) menjelaskan bahwa *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik (Budi Mulyawan, 2009: 9).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang diuraikan dengan kata-kata bukan dengan angka-angka menurut pendapat responden sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Taylor dan Bogdan yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bagong dan Sutinah, 2010: 166). Kelebihan metode penelitian kualitatif ini adalah melihat individu secara utuh dan menggunakan latar ilmiah, dengan menggambarkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan seperti wawancara dan dokumentasi.

Informan penelitian adalah orang yang faham dan mengerti tentang sesuatu yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bungin, informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Burhan Bungin, 2011: 78). Untuk

**Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik Perempuan dalam
Pengelolaan Pemerintahan Gampong (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

memperoleh data dan informasi, informan ditentukan secara purposif atau dengan cara *purposive sampling*, yaitu salah satu strategi menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin, 2011: 107)

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data. Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian (Sangadji dan Sopiah, 2010: 169). Oleh karena itu, Burhan Bungin (2013: 129) mengatakan peneliti harus mampu memahami data mana yang mesti digunakan dalam penelitian tersebut.

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber buku, sumber arsip, skripsi, tesis, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Bikle adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2006: 217).

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan tahapan tersebut, pertama sekali data dikumpulkan baik melalui wawancara maupun kepustakaan, lalu mereduksi data atau data diolah dengan memilah dan memilih, dan menyederhanakan data dengan merangkum yang penting-penting sesuai dengan fokus masalah penelitian. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu menyusun data-data yang telah direduksi dalam satuan-satuan dan tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Plt *Keuchik* Perempuan Dalam Pengelolaan Pemerintahan *Gampong* di Kecamatan Darul Imarah

Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) *Keuchik* Perempuan dalam Pengelolaan Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

Kepemimpinan (*leadership*) berkenaan dengan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok untuk suatu tujuan. Hersey, Blanchard dan Natemeyer (Thoha, 2010:91) menyatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri untuk memengaruhi orang lain, tetapi juga harus mengerti posisi mereka dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi orang lain sehingga menghasilkan kepemimpinan yang efektif.

Dalam konteks structural, kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga berarti usaha mengarahkan, membimbing dan memengaruhi orang lain, agar pikiran dan kegiatannya tidak menyimpang dari tugas pokok masing-masing. Adapun dalam konteks non structural kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses memengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengerahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Hj. Tati Nurhayati : 2012).

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang sulit diukur karena sifatnya yang multidimensional dan kualitatif. Namun karakteristik pemimpin yang dibutuhkan bisa diidentifikasi seperti berikut :

- 1) mengembangkan, melatih, dan mengayomi bawahan,
- 2) berkomunikasi secara efektif dengan bawahan,
- 3) memberi informasi kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan perusahaan dari mereka,
- 4) menetapkan standar hasil kerja yang tinggi,
- 5) mengenali bawahan beserta kemampuannya,
- 6) memberi peranan kepada para bawahan dalam proses pengambilan keputusan,
- 7) selalu memberi informasi kepada bawahan mengenai kondisi perusahaan,
- 8) waspada terhadap kondisi moral perusahaan dan selalu berusaha untuk meningkatkannya,
- 9) bersedia melakukan perubahan dalam melakukan sesuatu, dan
- 10) menghargai prestasi bawahan. (Tannenbaum dan Schmidt, 1958; Sofiaty, 1995; Purnama, 2005).

Berdasarkan sepuluh karakteristik diatas, maka kepemimpinan yang dibutuhkan oleh bawahan, dapat tercapai jika seorang pemimpin mampu menjalin komunikasi yang baik dengan para bawahan, karena dipahami bersama-sama bahwa para bawahan seorang pemimpin bekerja untuk mencapai tujuan organisasi,serta menjadi faktor pengaruh besar dalam

Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik Perempuan dalam 9
Pengelolaan Pemerintahan Gampong (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

kemajuan sebuah organisasi. Sedarmayanti (2011:68) mengatakan ukuran sejati kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih tidak kurang. Jika anda tidak punya pengaruh, anda takkan pernah dapat memimpin orang lain.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan plt *keuchik* Perempuan kurang mendapatkan respon positif dari mayoritas masyarakat *gampong*. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya karakteristik kepemimpinan yang dibawa oleh plt *keuchik* Perempuan yang didasarkan kepada konsep karakteristik kepemimpinan yang dijelaskan oleh Tannenbaum dan Schmidt. Selain itu, budaya patriarki serta permasalahan pribadi yang melekat pada diri seorang plt *keuchik* perempuan berdampak besar pada karakteristik kepemimpinan plt *keuchik* perempuan tersebut.

B. Kendala Apa Yang Dihadapi Plt *Keuchik* Perempuan dalam Pengelolaan Pemerintahan *Gampong* di Kecamatan Darul Imarah

Ridwan dan Sudrajat (2009:19) menjelaskan bahwa, pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik dapat menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok, dan masih banyak lagi. Begitu luas ruang lingkup pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi birokrasi melalui pelayan publik itu absah adanya. (Dwiyanto, 2014:96)

Pelayanan publik dilihat dari optik politik merupakan refleksi dari pelaksanaan Negara dalam melayani warga Negeranya berdasarkan kontrak kontrak sosial pembentukan Negara oleh elemen-elemen warga Negara.

Dari sisi sosial budaya, pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang didalam pelaksanaannya kental akan nilai-nilai, sistem dan bahkan unsur religi yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan kearifan lokal yang berlaku.

**Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) *Keuchik* Perempuan dalam 10
Pengelolaan Pemerintahan *Gampong* (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

Dari perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan. (Sirajuddin dkk, 2012:12)

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan plt *keuchik* perempuan memiliki kendala dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat *gampong* yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki oleh plt *keuchik* perempuan yang bersangkutan. Hal ini juga dikarenakan plt *keuchik* perempuan harus membagi waktu antara kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kantor Camat, plt *keuchik gampong* dan tanggung jawabnya sebagai Ibu Rumah Tangga. Selain itu, kematangan, ketenangan dan kemampuan seorang perempuan dalam memimpin sebuah desa atau *gampong* dengan segala kompleksitas permasalahannya sedikit banyak menghambat perempuan untuk menunjukkan kriteria kepemimpinan yang diinginkan masyarakat *gampong*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa :

Kesimpulan

1. Kepemimpinan plt *keuchik* perempuan dalam pengelolaan pemerintahan *gampong* untuk saat ini masih mendapat banyak pertentangan dari masyarakat *gampong*. Hal ini diakibatkan oleh pandangan skeptis masyarakat *gampong* terhadap kapabilitas kepemimpinan perempuan. Selain itu, budaya patriarki dan kondisi biologis seorang perempuan berdampak besar terhadap karakteristik kepemimpinan yang dibawanya.
2. Kendala yang dihadapi plt *keuchik* perempuan dalam pengelolaan pemerintahan *gampong* saat ini ialah dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Keterbatasan dalam membagi waktu antara kewajibannya sebagai PNS Kantor Camat, plt *keuchik gampong* dan tanggung jawabnya sebagai Ibu rumah tangga. Selain

itu, kematangan, ketenangan dan kemampuan seorang perempuan dalam memimpin sebuah *gampong* dengan segala kompleksitas permasalahannya sedikit banyak menghambat perempuan dalam mewujudkan kepemimpinan yang ideal seperti yang diharapkan oleh pengikutnya.

Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan perempuan bisa diwujudkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui diskusi dan interaksi yang dimediasi oleh pemerintah dan tokoh-tokoh setempat untuk membuka pola pandang terhadap kapabilitas perempuan dalam memimpin. Masyarakat juga harus memahami agar mereka tidak melihat laki-laki dan perempuan dari kaca mata biologis (peran kodrati) saja, namun lihatlah sebagai warga negara dan sumber daya manusia yang sama-sama mempunyai hak, kewajiban, kedudukan dan kesempatan dalam proses pembangunan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Bagi seorang pemimpin khususnya perempuan agar tidak menjadikan kendala atau hambatan sebagai tembok pembatas untuk menciptakan suatu tatana yang lebih baik dalam proses pembangunan, namun jadikan itu sebagai tolak ukur dalam merefleksikan diri agar tercapainya prinsip-prinsip kepemimpinan yang ideal. Pemimpin perempuan diharapkan agar jangan pesimis dalam memimpin, tetaplah optimis menjalankan tugas dan kewajibannya, karena kepemimpinan yang baik akan terlihat dari hasil kerja yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Teks

Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik Perempuan dalam 12
Pengelolaan Pemerintahan Gampong (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)
(Muhajir, Radhi Darmansyah)

- Thoha, M. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Udik Budi Wibowo. 2011. *Teori Kepemimpinan*. Yogyakarta : Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suryanto, Bagong & Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sedarmayanti. 2011. *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Ridwan dan Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa
- Agus Dwiyanto. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sirajuddin dkk. 2012. *Hukum Peleyanan Publik, berbasisi pertisipasi dan keterbukaan informasi*. Setara Press. Malang.

B. Jurnal / Artikel

- Alwi Hasyim Batubara. 2006. *Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah*. Jurnal Analisi Administrasi dan Kebijakan. Vol. 3. Hal 1.
- Hj. Tati Nurhayati. 2012. *Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja*. Jurnal Edueksos Vol I No 2.

C. Perundang-undangan dan Qanun

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong

**Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik Perempuan dalam
Pengelolaan Pemerintahan Gampong (Studi Kasus di Kecamatan
Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

(Muhajir, Radhi Darmansyah)

D. Skripsi / Tesis

Mufazzal 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan Di Parlemen Aceh)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

E. Website / Internet

Redaksi. "24 Keuchik bakal dipecat oleh Bupati Aceh Besar". Acehraya.co.id. <http://acehraya.co.id/index.php/2016/09/18/24-keuchik-bakal-dipecat-oleh-bupati-aceh-besar/>. Diakses 09 Februari 2017